

DINAMIKA ISLAM DAN POLITIK KERAJAAN BONE SEBELUM DAN SETELAH MEMELUK ISLAM

Oleh

Rahmawati

Email: rahmawati.harisa@yahoo.com

Dosen Tetap pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar

Andi Reni

Email :andireni@yaho.co.id

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang dinamika Islam dan politik kerajaan Bone Sulawesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Islam ditinjau dari aspek politik kerajaan Bone sebelum dan setelah Islam berkembang. Jenis penelitian ini adalah field research dan menggunakan beberapa pendekatan, seperti historis, dan politik. Adapun pengumpulan data dalam tulisan ini diperoleh melalui buku-buku karya ilmiah. Dari tulisan ini terungkap bahwa secara historis keberadaan kerajaan Bugis pada masa sebelum dan setelah Islam berkembang dipengaruhi oleh sistem politik penjajah Hindia-Belanda dan juga Jepang yang menjadikan Bone sebagai Koloninya. Dalam dinamika politik Islam yang dilakukan oleh penjajah setidaknya menghasilkan dua situasi .Yang *pertama* kedatangan penjajah awalnya untuk menguasai ekonomi kemudian berkembang menjadi usaha untuk menghimpun pasukan dengan mengangkat raja-raja sehingga dibentuklah *Bondgenoot Schappelijke Landen* dan *Gouvernement Landen*. Yang *kedua*, pada masa penjajahn Jepang muncul elit baru yakni yang dipengaruhi oleh kelompok Barat dan berorientasi pada Islam dengan mendirikan berbagai sarana pendidikan berbasis Islam. Memasuki masa kebangkitan Islam pada kerajaan Bone berbagai macam protes terhadap penjajah mulai berdatangan dengan melibatkan tokoh agama seperti ulama dan juga kaum priyai yang membawa pendidikan pada erah baru yakni pendidikan tanpa batas tanpa melihat perbedaan golongan.

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana dalam sejarahnya, bahwa pergelutan politik di Sulawesi Selatan pada akhir abad ke-18 seperti Gowa, Bone, Luwu, Wajo dan Soppeng, secara umum dijadikan barometer tentang keadaan politik masyarakat Sulawesi Selatan. Terdapat negeri dan daerah-daerah yang dijadikan oleh penguasa Belanda sebagai negeri atau daerah yang dilindungi yang disebut oleh Belanda sebagai *Bondgenoot Schappelijke Landen* (kerajaan sekutu) dan daerah lainnya disebut *Gouvernement Landen* (daerah pemerintahan).

Gouvernement Landen atau daerah pemerintahan ini dibagi atas dua kategori, yang pertama adalah daerah-daerah pemerintahan yang berada dalam kekuasaan dan pemerintahan langsung seperti distrik Makassar, Maros, dan Pangkajene. Adapun Bantaeng, Bulukumba, Selayar dan daerah lainnya adalah daerah pemerintahan yang tidak dikuasai lain halnya dengan Pare-Pare, Tanete, Tello, Wajo, dan Luwu yang menjadi daerah yang diperintah langsung oleh pemerintah Hindia-Belanda.¹

Islam diterima oleh masyarakat Bone secara resmi melalui jalur politik atau kekuasaan. Penguasa menerima dan sekaligus menggunakan Islam untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Islam dijadikan sebagai alat untuk memperkuat pengaruh dalam masyarakat. Pengaruh Islam yang kuat terhadap kerajaan Bone ini dijadikan oleh Belanda sebagai sekutu yang digunakan untuk memelihara keseimbangan kekuatan di kalangan kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Kekuatan kerajaan Gowa yang ada di pantai selatan Sulawesi harus dapat diimbangi oleh kerajaan Bone sehingga Belanda dapat mengawal keadaan dan kepentingan mereka khususnya di Sulawesi Selatan. Keadaan demikian diperlukan karena gerakan politik masih dalam suasana yang membimbangkan yang memungkinkan meletusnya peperangan melawan penguasa Belanda maupun antara kerajaan-kerajaan itu sendiri.

Pada tahun 1846 dengan penetapan raja Belanda dinyatakanlah bahwa seluruh Sulawesi berada dibawah kedaulatan kerajaan Belanda. Sejak itu Gouverneur van makassar disebut Gouverneur van celebes en Onderhorigheden. Atas kedaulatan Belanda yang dimuat dalam Gouverneur van celebes en Onderhorigheden selanjutnya dilantik jawatan-jawatan kekuasaan Belanda di daerah-daerah yang dikuasai oleh Gubernemen secara langsung. Selaku perantara pegawai bangsa Belanda dengan rakyat bumiputra, dilantik pula dari kalangan bumiputra kepala-kepala negeri dengan pangkat Regent, akan tetapi tetap menggunakan nama-nama kedudukan sebelumnya seperti gallarang (kepala desa) dan lain-lainnya.

Akan tetapi dengan meningkatnya pengaruh Belanda yang merata di berbagai tempat, semakin kuat pula ketidakpuasan hati dalam kalangan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar termasuk kerajaan Bone. Ketegangan timbul akhirnya menjelma menjadi perang diantara mereka. Dalam peperangan yang terakhir melawan Belanda kerajaan Bugis-Makassar termasuk kerajaan Bone mengalami kekalahan. Sejak itu kerajaan Bone dan Gowa tidak mempunyai raja lagi. La Pawawoi Karaeng Segeri, Arumpone terakhir ditawan dan diasingkan di Jawa Barat dan mangkat disana.

Bekas pusat-pusat kerajaan dijadikan oleh Belanda daerah pemerintahan langsung yang disebut daerah-daerah Gubernemen. Di Bone sendiri

ditempatkan seorang controluer sebagai kepala pemerintahan setempat yang bertugas menyusun bentuk aturan pemerintahan sesuai dengan model-model negeri jajahan. Dalam bulan April 1931, pemerintah Belanda melantik kembali seorang raja di Bone dan sebahagian alat-alat bekas kerajaan itu dikembalikan ke Bone. Ia bertujuan untuk menarik simpati rakyat melalui raja yang diangkatnya kembali dapat berguna untuk mencapai ketenteraman dalam rangka kekuasaan penjajahan. Pemerintah Hindia Belanda telah menjadikan bekas kerajaan Bone sebagai sebuah daerah yang disebut gubernemen ini berdasarkan surat perjanjian yang ditanda tangani raja Bone yang ke 32 yaitu Latenri Sukki Andi Mappanyukki, yang bergelar Sultan Ibrahim, putera dari La Makkulawu Karaeng Lembampareng Sombaya ri Gowa.

II. DINAMIKA POLITIK ISLAM DI BONE MASA PENJAJAHAN

Dalam sejarah penjajahan bangsa Indonesia khususnya bangsa Belanda dan Jepun yang datang di Indonesia dengan tujuan dan motivasi yang sama iaitu faktor ekonomi dan agama. Dalam ekonomi yaitu untuk mengembangkan usaha perdagangan dengan mendapatkan rempah yang mahal harganya. Awal kedatangannya pada tahun 1602 kompeni-kompeni tersebut bergabung dengan membentuk *Vereenigde Oost Indische Compaigne* VOC. Seiring dengan berkembangnya agama Islam di Indonesia walaupun berlangsung beberapa abad yang lalu bahkan sampai saat ini masih terus mengalami perkembangan.

Pelopor gerakan penjajahan Belanda terhadap kawasan Nusantara dimulai dengan organisasi perdagangan dagang Belanda di Hindia Timur atau yang lebih dikenal dengan VOC. Kedatangan Belanda ke Indonesia memberi dampak yang kurang baik kepada kelangsungan agama Islam. Hukum Islam yang bermazhab Syafi'I yang berlangsung cukup lama telah di hapuskan pada pemerintah kolonial Belanda dan menggantinya dengan hukum Belanda. Hukum syari'at hanya di batasi untuk bidang-bidang keluarga seperti nikah, talak, rujuk, dan sejenisnya. Namun, penggunaan hukum Belanda itu berhadapan dengan kesulitan. Ini disebabkan oleh penduduk peribumi enggan menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun memberikan kebebasan penduduk peribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.

Pada tanggal 25 Mei 1760 Belanda menerbitkan peraturan Resolutie der Indische Regeering yang kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. Melalui peraturan ini, Belanda hanya mengakui hukum Islam dalam bidang kekeluargaan (perkahwinan dan kewarisan) sahaja dan menggantikan kewenangan lembaga-lembagaa pengadilan Islam yang dibentuk oleh para raja atau sultan dengan pengadilan buatan Belanda hakim-hakim Belanda dibantu oleh para penghulu Qadi Islam.

Untuk membatasi ruang gerak ulama dalam mengembangkan hukum Islam, di keluarkan keputusan raja pada 4 Februari 1859 no. 78 yang memberikan kuasa kepada gubernur jenderal untuk mencampuri masalah agama. Bahkan, harus mengawasi gerak geri para ulama bila atas kepentingan ketertiban keamanan. Untuk melaksanakan tugas itu pemerintah Belanda membentukkan suatu komisi di bawah ketua Mr. Scholten dan Dad Haarlem. Pada tahun 1882 terbentuklah pengadilan agama yang menjadi sebuah institusi yang mengurus masalah dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, sedekah dan wakaf. Sebelum menjadi sebuah institusi, pengadilan agama masih berbentuk perorangan yang hakimnya dipegang oleh para penghulu atau ahli agama. Dengan pembentukan pengadilan agama menjadi sebuah institusi maka jelaslah bahwa pemerintah Belanda mengakui bahwa hukum Islam (*godsdienstige Wetten*) wujud bagi orang Indonesia yang beragama Islam.

Perbahasan sebelumnya menegaskan bahwa Islam telah mula bertapak pada abad ke 13 mengalami perkembangan selepas tempoh tersebut. Namun dalam pembahasan ini penulis berada pada perkembangan Islam pada abad ke 17, yang merupakan rangkaian dari perkembangan yang terjadi di kerajaan Bone. Pada abad ke 17 ini hampir meliputi perkembangan Islam di seluruh Indonesia yang merupakan titik-titik awal kedatangan orang-orang barat khususnya Belanda dan Jepun yang terlibat terlibat dalam masalah-masalah atau perubahan-perubahan yang terjadi secara drastik, baik dari bidang sosial, agama dan politik yang disusul oleh Penjajahan Jepun yang mempunyai tujuan yang sama dalam perdagangan ekonomi dan berbagai aspek lainnya.² Dalam hal ini maka muncul kedua elit baru baik yang dipengaruhi kelompok Barat itu sendiri, maupun : pengaruh yang berorientasi kepada Islam itu sendiri. Kelompok elit barat akan tercermin ketika dilaksanakan pendidikan yang berorientasi Barat pada golongan atas atau penguasa adat yang disebut golongan priyayi.

Akan tetapi dalam hal ini Islam yang digolongkan sebagai Islam ortodoks tetap menjalankan peranannya sebagai pusat perlawanan terhadap campur tangan dengan protes yang penuh amarah atas kedatangan orang-orang asing yang dianggap sebagai pemerintahan kafir yang bukan Islam oleh pemerintah kulit putih untuk mengatut masalah-masalah Islam Hingga munculnya rasa kekhawatiran Belanda terhadap Islam. Bayangan pan-Islam yang paling menakutkan terhadap agitasi pan-Islam dan telah melihat bahwa penaklukan Mekkah oleh Ibnu Saud yang membawah pengaruh yang mendalam. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan tentang perkembangan Islam khususnya di kerajaan Bone dalam zaman kedua penjajahan tersebut.

Islam di kerajaan Bone pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat pada masa pemerintahan Arung Palakka yang di kenang sebagai raja Bone pada tahun 1669-1696 M) yang menjalin kerjasama dan persahabatan dengan Belanda, namun dalam mengembangkan Islam tidak terhalang kerana pada awalnya Belanda tidak campur tangan dalam perkembangan Islam dan pelaksanaan hukum Islam pada era kekuasaannya. Hal ini dapat diketahui dalam sebuah catatan yang tertulis dalam Tolok Rumpuna Bone, yang disebutkan sebagai berikut:

Dimasa itu tuhan Yang Maha Kuasa menganugraahkan keagungan kepada Arumponedan tana Bone. Dimasa itu juga kedudukan Arungpone dan tana Bone menjadi tersohor di Sulawesi pada masa Arungpone Petta To risompae perjanjian lama dengan tanah Bone di berlakukan kembali, dan seluruhaturan adat yang disepakati oleh Dewan Penasehat dan Dewan Agama Islam turut diberlakukan.

Sampai saat ini perdebatan tentang pendekatan Latenritatta Arung Palakka yang berpihak kepada Belanda belum berakhir. Namun hal ini penulis menganggap bahawa sumbangan dalam mengembangkan Islam di kerajaan Bone bahkan di jazirah Sulawesi Selatan dalam kejayaannya membangun dan menciptakan kestabilan politik dan keamanan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sehingga Arung Palakka ini tidak hanya selaku Raja Bone, bahkan sekaligus sebagai penguasa tunggal di Sulawesi Selatan yang bergelar Datu Tungke'na Tana Ugi dan seluruh kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan tunduk dibawah kekuasaannya.³ Kondisi yang kondusif tersebut berpengaruh positif pada berkembangnya agama Islam di kerajaan Bone, bahkan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Perkembangan Islam selanjutnya semakin kuat dengan tampilnya seorang raja yang juga seorang ulama, iaitu Latenritappu Sultan Ahmad Shaleh Syamsuddin (1775-1821) adalah pengikut tarekat Khalwatiyah Yusufiyah salah satu tarekat yang berkembang di Sulawesi Selatan yang di bawah oleh Syekh Yusuf, Hingga Latenritappu ini bahkan berkunjung dan tinggal di Moros untuk memperdalam ilmu tasawuf lewat tarekat Khalwatiyah Yusufiyah. Bahkan beliau menghasilkan karya dua buah kitab dalam tulisan bahasa Arab.⁴

Perkembangan Islam di kerajaan Bone pada masa penjajahan Belanda ini juga ditandai dengan adanya usaha pembangunan masjid pada tahun 1940 yang di jadikan pusat pendidikan Islam yang ada di kerajaan Bone pada waktu itu. Wawancara H. Jawade (22 September 2015) Demikianlah, bahawa proses Islamisasi di kerajaan Bone di mulai dengan diterimanya Islam sebagai agama rasmi kerajaan pada awal abad ke 17M. Meskipun pada awalnya menolak,

namun pada akhirnya mengalami perkembangan dengan memantapkan Islam sebagai keyakinan yang menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakat Bone. Namun perkembangan politik Hindia Belanda berjalan dengan seiring berkembangnya Islam di seluruh wilayah Nusantara.

Sesudah VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda atas desakan Perancis, Indonesia lalu menjadi milik pemerintah Belanda. Sejak tahun 1816 tanah air kita disebut Hindia-Belanda (NederlandsIndies) dan dianggap sebagai bahagian dari *Pas Nederlandica* yang terdiri dari Indonesia, Suriname, Qurasyao, dan Nederlands sendiri. Pemerintah Belanda berusaha menanamkan ekspansi politiknya dengan memerangi kerajaan-kerajaan Islam dengan menggunakan politik *devide et empera*, memecah belah dan menguasai dan secara bertahap kerajaan-kerajaan itu satu persatu dijadikan bawahan pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan penjajahan politik, ekonomi, dan budaya Indonesia.

Mendahului kedatangan bangsa-bangsa asing tersebut di Indonesia, telah terjadi suatu perubahan besar dalam bidang politik dan kemasyarakatan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam menggantikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Budha dengan segala sistem kemasyarakatannya di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, bermula dari Sumatra, Jawa, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan sebagainya. Kerajaan-kerajaan Islam inilah yang memberikan perlawanan terus-menerus kepada para penjajah asing seperti pertentangan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo di Maluku terhadap penjajahan Portugis, Sepanyol, dan Belanda. Aceh dan Melaka menghadapi Portugis dan Belanda, Banten, Mataram, Gowa dan Banjar menghadapi Belanda. Dalam situasi kekuasaan penguasa tradisional yang mulai goyah, masyarakat mulai berpaling kepada pemimpin yang terdekat iaitu pemimpin agama atau para ulama. Tidak menghairankan kemudiannya tampil tokoh-tokoh agama memimpin perlawanan terhadap penjajah, seperti Imam Bonjol, pangeran Diponegoro, Cut Nyak Din, Tuanku Nan Rence, Syekh Yusuf al-Makassari dan lain-lain.

Keterlibatan para ulama dalam politik hampir sama usianya dengan sejarah peradaban Islam. Hal ini disebabkan oleh Islam sebagai sebuah agama tidak hanya mengajarkan tata cara bermuamalah, berinteraksi sosial dalam urusan dunia. Malahan Islam banyak mengajarkan nilai dan norma-norma dalam bermasyarakat dan bernegara, baik dalam lingkup lokal maupun Internasional. Dalam konteks Indonesia, peranan ulama dalam bidang politik pada zaman kerajaan-kerajaan Islam wujud dalam peranannya sebagai penasihat para sultan untuk menentukan langkah-langkah politiknya.

Pada masa awal Islamisasi Nusantara, Sultan dibantu oleh ulama yang menjadi penasihatnya menggunakan agama sebagai cara untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan yang bukan Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik, ekonomi dan keagamaan. Hal ini terlihat bagaimana sultan-sultan mengadakan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain, misalnya kerajaan Pasai mengahwinkan putrinya dengan raja muda Melaka yang semula masih Hindu bersama Prameswara menjadi raja Muslim bergelar Megat Iskandar Syah dan diangkat sebagai raja pertama kerajaan Islam Melaka. Contoh lain adalah perkahwinan Merah Silu Raja Samudra dengan puteri kerajaan Perlak yang beragama Islam dan menggabungkan kedua kerajaan menjadi kerajaan Samudra Pasai dan Merah Silu bergelar Malik al-Shaleh sebagai raja pertamanya. Perkahwinan puteri Trenggono Raja Demak dengan Joko Tingkir keturunan Majapahit. Persekutuan kerajaan Demak dengan Cirebon untuk menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa, pengiriman tentera kerajaan Demak untuk membantu Suryanshah raja Muslim pertama kerajaan itu, serta persekutuan Pasai dengan Cirebon dan Demak mengusir Portugis di Sunda Kelapa.

Namun, ketika sultan-sultan tidak mempunyai kekuatan politik lagi, maka para ulama berperanan sendiri menggalang rakyat yang tidak mempunyai raja kerana rajanya sudah dikalahkan penjajah. Para ulama atas nama Islam, menggalang kekuatan untuk melawan penjajah. Sejarah telah menunjukkan Perang Jawa (1825-1830) dipelopori Pangeran Diponegoro didampingi oleh Kiai Mojo. Walaupun perang ini berakhir dengan kekalahan, tetapi peranan politik ulama telah menjadi pelajaran politik umat Islam Indonesia. Penggalangan atas nama Islam telah memupuk cinta tanah air dan anti kolonial. Perang Sabil yang di canangkan oleh para ulama selalu menjadi landasan yang kuat dalam ketahanan umat untuk melawan kolonial.

Ketika penjajahan Belanda semakin meluas, muncullah gerakan protes yang didampingi oleh ulama lokal melawan Belanda yang dianggap kafir. Masyarakat muslim dan ulama lokal menganggap gerakan itu sebagai perang suci, perang terhadap kafir. Diantara gerakan protes lokal yang dipimpin oleh ulama adalah yang terjadi di Cilegon tahun 1888 M. Faktor pendorong terjadinya gerakan protes ini antara lain situasi kolonial yang menghimpit kehidupan rakyat, kondisi yang bertentangan dengan prinsip agama Islam seperti larangan umat Islam melakukan ibadah, tindakan yang semena-mena, rampasan tanah milik rakyat yang subur untuk tanam tebu, kerja paksa, pajak yang memeras, penderitaan rakyat akibat ketidakadilan, penumpukan rasa dendam, rasa kecewa, tekanan ekonomi yang sangat berat, kemudian dipersatukan dengan semangat jihad menjadi gerakan fanatik dan radikal.

Keresahan dan penderitaan rakyat akibat penjajahan, mendorong para kiai, ulama, dan haji untuk menghimpun rakyat tampil sebagai pemimpin dengan cara menghubungi beberapa pesantren. Melalui khubah-khutbahnya mereka mendorong rakyat melepaskan diri dari tindakan pemerasan dengan melakukan perang jihad. Mereka berhasil mendapatkan dukungan secara luas. Gerakan seperti ini belum dapat mengubah keadaan kerana hanya berupa letupan seketika. Kesemuanya nanti dilanjutkan oleh peranan organisasi dan partai yang mempunyai ideologi dan strategi yang lebih jelas di kota-kota besar, yang kelak akan berperanan sebagai dasar pengikat persatuan, simbol pembeza dengan kolonial, bahkan memberi rasa harga diri sebagai sebuah bangsa iaitu bangsa Indonesia.

Dikalangan rakyat pula makin kuatnya kolonial dirasakan sangat berat kerana terjadi eksploitasi hasil bumi untuk kepentingan penjajah. Dalam kondisi seperti itu rakyat bergabung dengan pemimpin non formal, para kiai, ulama, dan bangsawan yang menggalang rakyat untuk melawan dan berjuang atas nama agama terjadilah perang Padri (1821-1837), dipelopori Imam Bonjol dibantu delapan ulama yang bergelar Harimau nan Salapan, Perang Aceh (1873-1904) dipimpin oleh panglima Polim yang didukung oleh para ulama haji dan muslim Aceh. Walaupun perang ini kalah, tetapi Islam makin berkembang ke pedalaman di bawah bimbingan sisa-sisa pemimpin yang melarikan diri ke pedesaan, seperti sisa-sisa tentera Perang Padri di pedalaman Tanah Batak menjadikan sebahagian suku Batak memeluk Islam.

Sebahagian sisa-sisa pelarian perang Padri yang lain ada yang menyingkir ke Timur Tengah, bermukim di sana sambil menuntut ilmu sehingga terkena pengaruh reformasi Islam internasional. Diantara mereka adalah Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Djamil Djambek dan Tahir Djaluddin, disusul kemudian oleh H. Abdul Karim ayahanda Hamka. Ketika mereka kembali ke tanah air, mereka menyedari bahawa tidak akan mungkin bersaing dengan kekuatan kolonial dan penetrasi Kristen. Mereka menyedari bahawa mereka tidak akan berhasil kalau terus melanjutkan cara-cara tradisional. Oleh kerana itu, perlu diadakan perubahan-perubahan iaitu berjuang melalui organisasi-organisasi, baik bidang sosial pendidikan yang terkenal dengan nama Sumatera Thawalib ataupun melalui gerakan politik dengan nama Permi. Demikian juga K.H. Ahmad Dahlan di Jawa dengan gerakan Muhammadiyah dan K.H. Hasyim Asy'ari dengan gerakan Nahdatul Ulama (NU).

Meskipun latar belakang menyebabkan kegiatan dan pusat perhatian berbeza-beza; K.H. Hasyim Asy'ari menitikberatkan kepada kemurnian mazhab, sementara Muhammadiyah serta ulama-ulama muda Minangkabau

ingin kembali kepada sumber asli al-Quran da Hadis, tetapi mereka sama-sama ingin menjadikan Islam sebagai landasan ideologi.Selanjutnya menjadikan Islam sebagai perjuangan politik untuk melawan kekuasaan kolonial, menjadikan Islam sebagai usaha untuk mengangkat darjat diri berhadapan dengan kekuasaan kolonial. Islam juga dijadikan asaslandasan kesamaan, pengikat persatuan, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Syarikat Islam (SI), bangsa Islam yang mengawali perasaan kebangsaan sampai pengertian nasionalisme Indonesia ditemukan.

Hubungan antara kerajaan-kerajaan Bugis otonomi antara satu wanua (wilayah) atau akarungenng dengan wilayah lain yangsebelumnyadiatur dalam sistem perjanjian (kontrak) yang lebih fleksibel. Ia digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan prinsip hirarki kaku yang membagi-bagi wilayah menjadi kabupaten dan kecamatan seperti yang telah dijelaskan oleh penulis dalam bab terdahulu ini. Dengan adanya kekhuatiran kolonial terhadap nasionalisme dan terbentuknya cabang-cabang pergerakan politik dan keagamaan termasuk cabang yang ada di kerajaan Bone Sulawesi Selatan.Pergerakan tersebut sudah mulai merasakan senasib sebagai bangsa Indonesia. Pergerakan tersebut berwujud dengan didirikannya cabang Partai Serikat Islam (PSSI) pada tahun 1918 yang merupakan partai nasionalis yang paling aktif di Sulawesi Selatan. Selain itu juga terdapat organisasai yang lebih berpengaruh adalah Muhammadiyah meski bukan partai politik. Ia hanya bergerak dalam bidang pendidikan dan pembaharuan sosial dalam Islam, namun pimpinan Muhammadiyah pada umumnya merupakan kaum nasionalis serta anggotanya kelak berperanan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.⁵

Setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepun untuk kawasan selatan pada 8 Mac 1942, pemerintah Jepunsegera mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu di antaranya undang-undang no.1 tahun 1942, yang menegaskan bahawa pemerintah Jepun meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh gubernur jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja memberikan implikasi terhadap kedudukan perlaksanaanhukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda.Meskipun demikian, pemerintah pendudukan Jepun tetap melakukan berbagai dasar untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Diantaranya adalah:

- a. Janji panglima militer Jepun untyuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama majoriti penduduk pulau Jawa.
- b. Mendirikan shumubu (pejabaturusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.

- c. Mengizinkan berdirinya organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti Muhammadiyah dan NU.
- d. Bersetuju menubuhkan Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan Oktober 1943.
- e. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA.
- f. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan bidang pengadilan agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya sehingga Indonesia merdeka.

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan yang berarti bagi kedudukan hukum Islam selama masa pendudukan Jepun di tanah air. Dasar pemerintah Jepun terhadap pengadilan agama tetap meneruskan dasar sebelumnya (masa kolonial Belanda). Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepun lebih baik dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan.

Pada awal kedatangan Jepun di Indonesia akan di permudah oleh kelompok-kelompok Islam sebagai penentang anti Belanda yang kelihatannya diorganisir cukup rapi, seperti yang dikatakan di bawah sebagai penyaksian. Meskipun adanya larangan-larangan (Belanda) dan rintangan-rintangan kami senantiasa secara sembunyi-sembunyi mendengarkan siaran dari Jepang, sehingga kami bisa tahu bila mana mereka (orang-orang Jepun) akan datang disini. Dan ketika mereka benar-benar datang ribuan orang kami yang berkumpul di depan Masjid Agung dan menerima mereka dengan senang.

Memang benar bahawa rakyat kebanyakan khususnya sekitar Jawa semangat pasukan-pasukan pendudukan dengan bendera Indonesia dan Jepang, akan tapi penerimaan seperti ini sama sekali tidak bersifat keseluruhan, sampai ketinggian tertentu, tidaklah di warnai oleh fanatisme Islam. Di Sulawesi Selatan yang inisiatifkan oleh seorang tokoh Abdul Kahar Musakir, seorang pemimpin pemuda Muhammadiyah yang disegani melawan Jepun dengan memperingatkan Ozaki bahawa:

Cukup banyak orang Nippon yang telah mempelajari prinsip-prinsip Islam kerana itu mereka harus tahu bahawa Islam itu bukan hanya agama akan tetap seluruh (*way of life*) meresapi seluruh masyarakat. Perjuangan melawan imperium barat sudah lama kami kenal, sehingga kami menerima tujuan Nippon untuk melawannya, tetapi prinsip yang harus dianut secara ketat untuk mencapai kerja sama yang diinginkan

haruslah, kami dengan agama kami, kamu dengan agama kamu” perbedaan diantara semua kepercayaan kita tidak perlu menghalangi kerjasama ikta untuk mengusir sekutu dari Asia, yang adalah rumah bagi semua agama

Meskipun para pemimpin Islam Indonesia tidak mampukerana hakikat persoalan yang mengganggu ini berharap untuk mencapai kemenangan yang meyakinkan terhadap nipponisasi, sekurang-kurangnya mereka berhasil untuk akhirnya membebaskan kaum Islam unutk mengadakan pertemuan-pertemuan. Namun obsesi Jepang terhadap pan-Islam pada dasarnya sangatlah serupa apa yang dilakukan oleh pendahulunya. Akan tetapi Belanda berusaha untuk menyingkirkan pengaruh politik dari pusat-pusat Islam di luar negeri

Kedatangan dan kekacauan pada akhir masa penjajahan ditandai pada pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945. Pada periode pendudukan Jepang yang merupakan masa-masa yang paling sulit walaupun tidak banyak perubahan terhadap struktur pemerintahan Belanda. Perkantoran dan jabatan administratif hanya berganti nama Jepang dari pejabat Belanda. Namun period ini singkat tersebut menandai suatu titik balik penting kerana kekuasaan Eropa dengan begitu mudah di tumbangkan.

Demikian hal itu terus berjalan di kerajaan Bone di bawah kekuasaan raja-raja Islam hingga datangnya suatau masa yang mengakhiri bentuk kerjaan menjadi sebuah kabupaten dalam bingkai Negara Republik Indonesia pada tahun 1951.

III. POLITIK ISLAM PADA KERAJAAN BONE SETELAH ISLAM

Pada periode setelah berkembang Islam di Bone sangat nampak dari segala aspeknya yang dipimpin oleh raja Andi Mapanyukki yang disebut sebagai masa raja yang terakhir, kehidupan sosial keagamaan meningkat, komitmen terhadap ajaran Islam diwujudkan dengan kepedulian menerapkan nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat Bugis Bone. Selain itu juga diiringi dengan sikap keteladanan yang ditunjukkan, beliau dikenal sangat taat dalam menjalankan syariat Islam. Sumbangsih Andi Mappayukki terhadap pelaksanaan pengembangan Islam ditandai dengan inisiatifnya untuk mengadakan “Pertemuan Ulama Celebes Selatan” pada tahun 1934 di Watampone, ibu Kota Kerajaan Bone, musyawara itu diikuti oleh puluhan ulama terkemuka dari seluruh Sulawesi Selatan, termasuk hadir didalamnya Haji M. As’ad yang isinya untuk membicarakan cara-cara pengelolaan pendidikan Islam bagi masyarakat umum.⁶

Berkenaan dengan pendidikan agama tersebut memang telah disadari raja Bone Andi Mappanyukki dengan beranggapan bahawa pendidikan adalah usaha utama dalam mengantar dan mewujudkan anak didik ke arah

kedewasaan lahir batin. Ditambahkannya lagi bahawa kelangsungan hidup pendidikan dalam masyarakat, ditumbuhkan melalui dasar-dasar pendidikan budi pekerti dan mempertinggi rasa kemanusiaan. Konsep ini yang dipahami dan dirasakan oleh raja Bone Andi Mappanyukki dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh kerana itu, pengembangan dalam pendidikan tidak cukup hanya pembinaan dalam lingkup keluarga saja, tetapi diperlukan sebuah pendidikan formal dalam rangka peningkatan wawasan pengetahuan bagi anak didik.

Konsepsi pendidikan Andi Mappanyukki memang memiliki pandangan jauh ke depan, kerana pemahaman beliau tentang pendidikan juga diungkapkan oleh pakar pendidikan modern dengan konteks yang sama. Salah satu diantaranya Sidi Gazalba yang menurutnya bahawa asasnya pendidikan dipandang dari sudut kebudayaan, terbagi atas tiga bahagian yakni pendidikan keluarga atau rumah tangga sebagai lingkaran pendidikan yang utama, pendidikan lembaga-lembaga formil sebagai lingkaran pendidikan kedua, pendidikan masyarakat sebagai lingkaran pendidikan umum.⁷

Perpaduan yang harmonis antara ulama dan umara pada masa Andi Mappayukki membawa angin segar bagi penegakan perkembangan syariat Islam di Bone, pemerintah memberikan kemenangan pada ulama, dalam bidang keagamaan, sehingga keduanya mampu berjalan beriringan dengan semboyan, *Riappaketenningi Ade'e pattupui ri sara'*, "artinya adat tempat berpegang dan sara' tempat saudaranya". Sejak masa itu peran ulama tidak hanya tergabung dalam organisasi qadhi, tetapi banyak di antara mereka melakukan aktivitas keagamaan di luar dari kordinasi organisasi formal. Para ulama lebih banyak memberikan pengajaran agama di masyarakat, termasuk yang dilakukan di tempat-tempat ibadah.

Para pengasuh Madrasah Amiriyah, selain dari ustaz yang berasal dari Bone sendiri, terdapat pula tenaga pengajar yang didatangkan dari luar, seperti 'Abd al-Aziz al-Hasyimi al-Murabi dari Makkah dan 'Abd al-Hamid dari Mesir. Menurut Mahmud Yunus, pada mulanya madrasah yang juga dikenal dengan nama Amir Islam School ini dipimpin oleh Ustadz 'Abd al-'Aziz al-Syimi al-Misri kemudian digantikan oleh Syaykh Mahmud 'Abd al-Jawwad al-Madani yang menjalankan tugas kepemimpinan madrasah yang dibebankan kepadanya sejak tahun 1935 sampai tahun 1948. Mata pelajaran yang diajarkan di sini tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu keislaman saja, tetapi juga ilmu-ilmu yang digolongkan pengetahuan umum.⁸ Pada perkembangan berikutnya yakni pada tahun 1939, madrasah ini mendapat dukungan tenaga pengajar yang sengaja didatangkan dari Sumatra iaitu Ustadz Zainuddin Haji (alumni Normal Islam Padang), M. Arifin Jabbar (alumni HIK Jawa) dan Haji Darwis Amini yang tetap mengajar di madrasah ini hingga masa pendudukan Jepun.⁹ Di

samping itu, masjid-masjid menjadi tempat pengajian dan pendidikan agama yang rasmi dan ramai dikunjungi oleh penduduk untuk mendapatkan bimbingan keagamaan.

Sebagai maklum balas tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat, pengelolaan madrasah ini ditingkatkan sesuai dengan kemajuan, di antaranya dengan mengganti nama menjadi Madrasah al-Amiriyah al-Islamiyah. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikannya, madrasah ini mendapat dukungan tenaga baru iaitu Syekh Mahmud al-Jawwad. Di tangan beliau, sistem pendidikan di madrasah ini diarahkan ke sistem klasikal seperti yang sudah dilaksanakan di MAI Wajo, di mana beliau pernah menghabiskan waktu selama beberapa tahun mengajar sebelum pindah ke Watampone. Hanya saja, lembaga pendidikan yang semula digagas oleh Raja Bone Andi Mappanyukki ini tidak berkembang seperti halnya dengan kemajuan yang dicapai oleh perguruan As'adiyah maupun DDI. Kerana itu popularitas Madrasah Amir al-Islamiyah ini jauh berada di bawah popularitas perguruan kedua lembaga pendidikan di atas. Meskipun demikian, haruslah diakui bahawa madrasah ini sebagai salah satu lembaga pengkaderan calon ulama yang telah berperan melahirkan beberapa orang ulama di kabupaten Bone seperti Abd. Aziz Palaguna.

Selain Madrasah Amir Islam, di Kota Watampone terdapat pula sebuah pesantren yang didirikan oleh K. H. Junaid Sulaiman bernama Ma'had Hadis (Arab: Ma'had al-Hadits). Pendiri lembaga pendidikan ini pernah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun di Makkah dan Madinah untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Berbeda dengan umumnya ulama-ulama Bugis-Makassar yang merupakan murid-murid K. H. Muhammad As'ad, K. H. Junaid Sulaiman bukanlah murid langsung K. H. Muhammad As'ad. Dalam mengelola lembaga pendidikannya, K. H. Junaid Sulaiman memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah Bone maupun dari Golongan Karya (Golkar) Bone. Para santri pesantren ini, selain mendapatkan pelajaran agama Islam, juga mendapatkan pelajaran umum. Sedang arah pembinaan yang ditekankan di sini adalah kemampuan untuk menghafal al-Quran. Hanya saja dalam perkembangannya kemudian, lembaga pendidikan Islam ini juga mengalami nasib yang tidak menggembirakan lantaran kurang memperoleh simpati masyarakat disebabkan oleh dukungan lembaga ini terhadap Golkar.¹⁰

Meskipun lembaga pendidikan Islam ini masih berjalan sampai sekarang, nasib pesantren ini masih tidak menentu. Sejumlah pesantren di Sulawesi Selatan yang mengalami nasib yang sama adalah pesantren-pesantren yang pernah bernaung di bawah "bendera" Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), satu organisasi pendidikan Islam di bawah Golkar.

Kenyataan ini menjadi bukti kuat yang mendukung kebenaran pandangan umum yang berkembang di masyarakat yang mengatakan bahawa lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial kemasyarakatan yang dikelola atas dasar kepentingan politik semasa akan mengalami nasib yang kurang mengembirakan jika tidak bubar dengan sendirinya.

Selain nama-nama ulama Bugis-Makassar yang telah dikemukakan di atas, masih terdapat sejumlah nama ulama Bugis-Makassar yang berperan melahirkan ulama atau kader ulama Bugis-Makassar, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Mereka yang masih hidup terus berkarya baik sebagai pendidik maupun sebagai mubaligh. Nama-nama ulama Bone yang sudah wafat namun tetap dikenang sebagai ulama Bugis yang berpengaruh adalah: Haji Husein bin Umar.¹¹

Apabila nama-nama ulama yang dikemukakan di atas yang umumnya digolongkan sebagai ulama-ulama yang cenderung bersikap akomodatif terhadap pemahaman dan pengamalan Islam yang sudah mengakar dan melembaga secara turun-temurun di masyarakat Bone, maka perlu pula dikemukakan di sini barisan ulama yang dapat dikategorikan sebagai kelompok ulama “pembaru” dalam pengertian memiliki kecenderungan untuk melakukan usaha pemurnian pemahaman serta pengamalan ajaran Islam yang mereka yakini telah tercemar oleh unsur-unsur non-Islam yang berbentuk tahyul, khurafat dan bid’ah. Di antara ulama yang bisa dikategorikan ke dalam kelompok ini adalah Haji Abdullah, seorang penggagas berdirinya kelompok al-Sirat al-Mustaqim di Makassar pada tahun 1923 yang kemudian menjadi pencetus kepada kelahiran Muhammadiyah di kota tersebut.

Haji Abdullah adalah ulama Sulawesi Selatan yang pertama-tama menyatakan secara terbuka, bahawa kalau solat Jumat tidak ada solat Zuhur, pernyataannya itu menggemparkan kota Makassar, sehingga Kadhi Makassar, Maknun Daeng Marangka mengadukannya ke Pengadilan. Dalam pengadilan, hakim memutuskan Haji Abdullah bebas dari segala tuduhan. Maka semakin masyhurlah nama beliau keseluruh pelosok Sulawesi selatan termasuk di Bone.

Pada perkumpulan al-Sirat al-Mustaqim, Haji Abdullah menjadi ketua, beberapa orang ulama lainnya menjadi anggota pengurus, diantaranya Haji Abdul Razak, Muh. Said Daeng Massikki, Mansyur al Yamani, Haji Jakarah, Haji Nuhung, Haji Haba Tahir yang kemudian menjadi pelopor-pelopor gerakan Islam Muhammadiyah. Dalam bulan April 1926, atas inisiatif mansyur al-Yamani, seorang Arab pedagang batik dari Surabaya bersama Haji Abdullah, dimulailah prakarsa pembentukan organisasi Muhammadiyah, dan sejak saat itulah mulai muncul sejumlah ulama yang berusaha mengembangkan pemikiran Islam yang bercorak puritanistik.

Dalam Persyarikatan Muhammadiyah, Haji Abdulah dan kawan-kawannya bekerja keras memberantas kemusyrikan, bidah, khurafat dan tahyul. Mereka mendirikan tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah agama dan rumah-rumah pemeliharaan anak yatim. Diselenggarakan juga berbagai tabligh dan kegiatan dakwah di tempat-tempat umum, walaupun diawasi dengan keras oleh PID (Politik Inlictingen Dienst) dari Kepolisian Hindai Belanda.

Sejak awal gerakan Islam Muhammadiyah itu ditangani oleh haji Abdullah, beliau senantiasa memperoleh hamatan dari kaum adat dan kaum raja-raja. Pemerintah Zelfbestuur Bone umpamnya, dikenal amat keras menentang Muhammadiyah. Pemerintah Zelfbestuur Bone umpamnya, dikenal amat keras menentang Muhammadiyah. Berbagai aturan diadakan yang menghambat masuknya Muhammadiyah di daerah Zelfbestuur Bone. Akan tetapi ajaran Muhammadiyah itu lambat laun diterima juga oleh orang-orang terkemuka di Bone. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan cepatnya memperoleh tempat yang sangat mendorong kesadaran masyarakat yang lebih luas dan menerima pandangan-pandangan baru tentang Islam seperti yang dilakukan oleh Nahdhatul Ulama.

IV. CORAK DAN BENTUK KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT SETELAH ISLAM BERKEMBANG DI BONE

Islam diterima oleh masyarakat Bone secara rasmi melalui jalur politik atau kekuasaan. Penguasa menerima dan sekaligus menggunakan Islam untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Islam dijadikan sebagai alat untuk memperkuat pengaruh dalam masyarakat. Pengaruh Islam yang kuat terhadap kerajaan Bone, walaupun pada waktu proses penerimaan mendapatkan segala rintangan dan tantangan akibat dalam seruan oleh kerajaan Gowa yang dilandasi dengan politik ekspansi wilayahnya. Sehingga muncullah suatu peperangan dengan istilah masyarakat pada waktu itu disebut *Musuh Selleng* atau dengan nama popularnya *Islamic War*.

Dengan kedatangan Islam di daerah Bone ini dapat dilihat perkembangannya sejak peralihan kekuasaan raja dari La Tenri Pala raja ke 12 oleh La Maddaremmeng raja Bone yg ke 13, salah satu bukti pada waktu itu dengan dihapuskannya perbudakan secara menyeluruh, seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Oleh kerana itu, Islam datang ke daerah ini secara berangsu-angsur telah merubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek keagamaan, pemerintahan, pendidikan maupun aspek sosial masyarakat.

Diterimanya Islam ini oleh masyarakat Bone dan menjadi bahagian dari budaya iaitu ade, rapang, wara dan sara (syariat Islam) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan sistim kerajaan. Setiap keputusan raja

harus melibatkan ulama dan petugas agama yang menduduki posisi penting waktu itu disebut qadi. Jika ada kelompok masyarakat yang tidak mau menerima sisitim ini maka dianggap bukan warga Bugis atau Bone, Jadi masyarakat Bone waktu itu sangatlah feodal. Adat (ade) mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi kerana manusia memiliki kemuliaan yang tinggi pula, manusia dapat hidup dengan baik dan hak serta kewajiban mesti di jaga dengan baik. Budaya masyarakat Bugis dan Bone pada khususnya memberi landasan pada rakyatnya yang kuat untuk mengembangkan sosial kebudayaan. Namun terkadang ada semacam dorongan dari sebahagian masyarakat Bugis pada umumnya termasuk masyarakat bone itu sendiri mempunyai sifat feodal, yang sangat patuh terhadap penguasa, sementara penguasa tidak boleh sewenang-wenang.

Islam merupakan agama yang dihayati dan diamalkan. Sementara itu budaya memberikan pengaruh yang sangat kuat, sehingga tidak sedikit pemegang otoritas agama terpengaruh dengan gaya feodalistik. Sekarang dapat dilihat bagaimana sikap masyarakat terhadap penguasa dan pemangku agama, tentu sama-sama dengan posisi kekuatannya. Akan tetapi dalam amalannya bahawa pemegang otoriti agama lebih kuat dari pada politik. Dalam sejarah agama dipegang sebagai alat kerajaan yang disebut qadih sedangkan diabad moden ini pegawai agama menjadi pegawai biasa saja yang mempunyai lembaga kementerian yang disebut kementerian agama dengan status pegawai negeri sipil. Tokoh agama yang bekerja di sektor pegawai negeri sipil (PNS) dianggap ulama dan tokoh agama yang bukan Pegawai negeri sipil di hormati kerana mereka memiliki integriti seperti ilmu dan perilaku, sehingga dianggap tokoh yang sangat penting.

Peranan birokrat sangat relatif, kekuatan mereka dalam pengembangan Islam tergantung dari sistem. Pada dasarnya birokrat adalah pelayan masyarakat. Sedangkan bangsawan disini juga sangat relatif bahkan tidak nampak peran mereka saat ini dan mereka kehilangan momentum untuk memberi kontribusi kerana bangsawan dahulu adalah sebagai tokoh yang disegani, namun sekarang sudah kehilangan pengaruh sehingga menjadi bahagian dari dilema. Mereka merasa memiliki masa lalu dan masih menuntut untuk di perlakukan sama seperti masa lalu. Misalnya mereka ingin di hargai dan sekarang sudah terjadi perubahan, mereka ingin berperan tetapi tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki integritas.

V. PENUTUP

Dari sejarah dinamika politik Islam di kerajaan Bone Sulawesi Selatan baik sebelum dan setelah Islam dapat diketahui bahwa berkembnagnya kerajaan Bone tidak terlepas dari dinamika politik Hindia-Belanda dan Jepang.

Penerapan nilai –nilai Islam pada kerajaan Bone pun tidak terlepas dari politik yang ditanamkan oleh Kerajaan Gowa yang menginginkan seluruh wilayah Sulawesi Selatan menerima Islam sebagai agama kerajaan, meskipun oleh kerajaan Bone dinilai sebagai tindakan politik kerajaan Gowa untuk menguasai dan mendiskreditkan kerajaan Bone melalui politik pengislaman.

Oleh karena itu berkembangnya Islam di Bone sebagaimana yang dirasakan saat ini. Dalam pelaksanaannya, politik bertujuan untuk kepentingan perlindungan dan kesejahteraan rakyat. Namun di awal perkembangannya politik Islam yang berlangsung pada kerajaan Bone memperlihatkan kondisi yang tidak demikian. Politik sebagaimana yang diperkenalkan oleh pemerintah penjajah sebelum Islam berkembang pada tatanan kehidupan masyarakat, murni untuk kepentingan ekonomi dan juga pembentukan pertahanan bagi penjajah agar tidak mendapat perlawanan dari masyarakat setempat. Sehingga ia berasumsi untuk menanamkan koloninya ia harus ikut mendukung segala sesuatu yang merupakan ciri khas daerah tersebut termasuk di dalamnya peribadatan. Melalui gerakan politiknya ia memberikan keleluasaan untuk masyarakat beribadah disamping mengontrolnya dengan melantik beberapa raja-raja yang dianggap bisa diajak kerja sama. Melalui raja-raja ini beberapa wilayah dikembalikan penjajah atas kerajaan Bone disamping mendirikan beberapa pendidikan yang berbasis madrasah.

Setelah Islam diterima oleh masyarakat Bone secara resmi melalui jalur politik atau kekuasaan. Penguasa menerima dan sekaligus menggunakan Islam untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Islam dijadikan sebagai alat untuk memperkuat pengaruh dalam masyarakat. Akan tetapi dalam amalannya bahwa pemegang otoritas agama lebih kuat dari pada politik. Dalam sejarah kerajaan Bone agama dipegang sebagai alat kerajaan yang disebut qadhi sedangkan diabad moden ini pegawai agama menjadi pegawai biasa saja yang mempunyai lembaga kementerian yang disebut kementerian agama dengan status pegawai negeri sipil.

Endnote :

¹Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. (Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995), h. 319.

²Stutterheim, *A Javanese Period in Sumatran History*. (Surakarta: De Bliksem, 1950), h. 107-133.

³Leonard Y. Andaya, *Warisan Arung Palakka Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. (Jakarta: 2006), h. 328-329.

⁴Abu Hamid, *Syekh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), h. 2018

⁵Sarita Pawiloy, *Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan*. (Ujung Pandang, 1987), h. 32.

⁶Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 18

⁷Sidi Gazalba, *Pendidikan Islam dalam Masyarakat*. (Jakarta: Pustaka Antara, 1962), h. 89.

⁸Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Idonesia*. (Jakarta: Mutiara,1995), h. 327.

⁹Abd. Rahman Getteng., *Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan: Tinjauan Historis dari Tradisional Hingga Modern*. (Yogyakarta: Graha Guru, 2005), h. 79.

¹⁰Mattulada, *Islam di Sulawesi Selatan*, dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*. (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1983), h. 228.

¹¹Abu Hamid, *Syekh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*, h. 389.

AFTAR PUSTAKA

Andaya, Leonard Y., *Warisan Arung Palakka Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. Jakarta: 2006.

Departemen Pendidikan, *Laporan Pengumpulan Data Peninggalan Sejarah di kabupaten Bone, Suaka Penionggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Sulawesi Selatan* ,1981/1982.

Gazalba, S. *Pendidikan Islam dalam Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Antara, 1962.

Hafid, Y., *Kerajaan Luwu Menurut Catatan D.F. Van Braam Morris*,” dalam Iwan Sumantri (ed.), *Kedatuan Luwu, Perspektif Archeologi, Sejarah dan Antropologi*, Edisi Ke-2, Makassar: Jendela Dunia, 2006.

Khaldun, A. R. Ibn, *Tarikh Ibn Khaldun*, Beirut: Maktabah al-Lubnan, 1992.

Mappangara, S., *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*.Makassar: Lamacca Press, 2003.

Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995.

- Nur, Azhar. *Tri Aliansi Kerajaan Bone – Soppeng – Wajo*. Cet. I; Yogyakarta: Kota Kembang Yogyakarta, 2009.
- Nur, Azhar, et.al., *Lontara Manurungnge ri Tompo Tika*. Ujung Pandang: Pusat Penelitian IAIN Alauddin Makassar, 2000.
- Patunru, A. D. (1967), *Sejarah Gowa*. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Makassar.
- Patunru, A. D. et. al., *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993.
- Rahim, Abd. & Ridwan B.. *Sejarah Tallo (Sebuah Transkripsi Lontara)*, Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi Ujung Pandang, 1975.
- Rahim, R. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS, 1985.
- Stutterheim, A *Javanese Period in Sumatran History*. Surakarta: De Bliksem, 1950.